

**Perencanaan Tenaga Kerja Makro: Studi Kasus Implementasi Program
Kartu Pra-Kerja Sebagai Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia di Indonesia**

**Ahmad Salafuddin Bahri, Dita Ayu Oktavia Ramadani, Niken Ira Yuliasuti, Tita
Andari Sukma, Aldila Putri Rahma, Richa Septia Ariyanti**

Universitas Negeri Semarang

slfdnbhr241105@students.unnes.ac.id, ditaoktaviaramadani@students.unnes.ac.id,
nikeniraa@students.unnes.ac.id, titaandarisukma24@students.unnes.ac.id,
aldilaputrirahma104@students.unnes.ac.id, richaseptia4@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

Indonesia currently faces strategic opportunities through the demographic bonus, but major challenges also arise in macro workforce planning. One of the main problems is the mismatch between the skills of education graduates and the demands of the world of work, which are increasingly complex due to the acceleration of digital transformation and the impact of the COVID-19 pandemic. To address this, the government launched the Pre-Employment Card Program in 2020 as an effort to develop the quality of human resources through vocational training and entrepreneurship. This study aims to evaluate the implementation of the Pre-Employment Card Program as part of a macro workforce planning strategy and examine its impact on improving work competencies, reducing unemployment, and improving the economic quality of the community. The methodology used is a descriptive qualitative approach with secondary data analysis from various sources. Based on the research, the program has succeeded in expanding access to digital skills training, reducing open unemployment, and improving the work readiness of the young workforce. However, challenges such as the digital divide in underdeveloped areas and uneven quality of training are still a concern.

Keywords: *Macro workforce planning, Pre-Employment Card, Human Resources, vocational training, unemployment, demographic bonus.*

ABSTRAK

Indonesia saat ini menghadapi peluang strategis melalui bonus demografi, namun tantangan besar juga muncul dalam perencanaan tenaga kerja secara makro. Salah satu masalah utama adalah adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan pendidikan dan tuntutan dunia kerja, yang semakin kompleks akibat percepatan transformasi digital dan dampak pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah meluncurkan Program Kartu Pra-Kerja pada tahun 2020 sebagai upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi dan kewirausahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Kartu Pra-Kerja sebagai bagian dari strategi perencanaan tenaga kerja makro serta mengkaji dampaknya terhadap peningkatan kompetensi kerja, pengurangan angka pengangguran, dan meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder dari berbagai sumber. Berdasarkan penelitian program ini berhasil memperluas akses pelatihan keterampilan secara digital, menurunkan pengangguran terbuka, serta meningkatkan kesiapan kerja angkatan kerja muda. Meski demikian, tantangan seperti

kesenjangan digital di daerah tertinggal dan ketidakmerataan mutu pelatihan masih menjadi perhatian.

Kata kunci: Perencanaan tenaga kerja makro, Kartu Pra-Kerja, Sumber Daya Manusia, pelatihan vokasi, pengangguran, bonus demografi.

PENDAHULUAN

Indonesia di era saat ini sedang berada dalam fase bonus demografi, yaitu suatu kondisi dimana jumlah penduduk dengan usia produktif (15–64 tahun) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usia non-produktif. Dengan adanya fenomena seperti ini maka dapat dijadikan sebagai peluang emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berkelanjutan, namun disisi lain juga dapat menjadi tantangan yang cukup besar dalam hal perencanaan tenaga kerja makro. Di waktu dan posisi yang sama, perkembangan teknologi yang terjadi sangat pesat di era saat ini serta terjadinya disrupsi digital sangat mempengaruhi hingga mengubah lanskap dunia kerja secara drastis. Banyak sekali berbagai jenis pekerjaan lama dan terdahulu yang perlahan menghilang, sementara di sisi lain jenis pekerjaan baru yang sangat membutuhkan keterampilan digital dan adaptif bermunculan.

Namun, kesenjangan keterampilan (*skill gap*) antara lulusan pendidikan formal dengan kebutuhan riil industri menjadi salah satu hambatan utama dengan porsi yang sangat besar dalam mengoptimalkan potensi tenaga kerja. Saat ini banyak sekali lulusan pendidikan yang tidak menguasai bahkan belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di pasar kerja, baik dari segi keterampilan teknis maupun keterampilan lunak (*soft skills*). Hal ini menunjukkan perlunya strategi perencanaan tenaga kerja makro yang tidak hanya kuantitatif, tetapi juga berkualitas atau tidak hanya banyak tenaga kerja saja, namun harus dibarengi dengan kemampuan yang mumpuni.

Sebagai respons terhadap problem seperti ini, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Kartu Pra-Kerja pada tahun 2020 yang menjadi salah satu strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program ini dirancang dengan tujuan sebagai program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang menasar masyarakat usia produktif agar tidak sia-sia dan bisa bermanfaat dengan baik, baik dipergunakan untuk yang sedang mencari kerja, korban PHK, bahkan para pekerja yang ingin meningkatkan *skill* dan keterampilannya.

Melalui studi kasus ini, penelitian akan membahas bagaimana implementasi Program Kartu Pra-Kerja dalam konteks perencanaan tenaga kerja makro serta membedah dan mengevaluasi sejauh mana program ini efektif dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia secara menyeluruh. Penelitian ini juga akan mengkaji peran Program Kartu Pra-Kerja dalam menjawab tantangan-tantangan ketenagakerjaan di era digital dan *post-pandemi*.

TINJAUAN LITERATUR

Perencanaan Tenaga Kerja Makro

Menurut Koestedjo (2016) Perencanaan tenaga kerja makro adalah suatu proses untuk menyusun rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang berisi penggunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja/buruh meningkat. Sedangkan berdasar UU No. 13 Tahun 2003 dan PP No 15 Tahun 2007, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No Per.16/Men/Xi/2010 yang mengatur tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro. Pada pasal 1, pengertian perencanaan tenaga kerja makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Program Kartu Pra-Kerja

Kartu pra-kerja juga merupakan kartu yang diberikan kepada para pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi yakni *skilling*, *up-skilling*, dan *re-skilling* serta sertifikasi kompetensi kerja (Ningrum et al., 2022). Program Kartu Pra-Kerja ini adalah program pengembangan ketrampilan yang memberikan dukungan atau pelatihan bagi individu yang sedang mencari pekerjaan, korban PHK, atau pekerja yang ingin menambah kompetensi. Pada program ini, masyarakat mendapat dua hak yaitu pelatihan yang dilakukan secara daring yang berguna untuk meningkatkan kualitas individu sesuai dengan minat dan bakat, serta adanya bantuan dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan lainnya.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah hal yang penting dalam pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan. Menurut Fitriani (2020), kualitas SDM berisi kemampuan kognitif, keterampilan teknis, serta sikap kerja yang mendukung produktivitas dan kesiapan menghadapi perubahan. Dalam pembahasan Program Kartu Pra-Kerja, peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan keterampilan kerja secara digital sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, serta akurat berdasar hal yang diteliti dengan perspektif subjek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena peneliti dapat mengembangkan berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu secara komprehensif tanpa bergantung pada angka dan pengukuran statistik. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur yaitu jurnal akademik, publikasi pemerintah,

serta data dari platform ketenagakerjaan. Melalui metode ini, peneliti berupaya menghasilkan interpretasi yang komprehensif terhadap implementasi dan strategi yang dapat diterapkan oleh pemangku kebijakan dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang dapat bersaing secara global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Kartu Pra-Kerja Dalam Perencanaan Tenaga Kerja Makro

Perencanaan tenaga kerja tingkat makro merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan permintaan yang ada di pasar kerja, yang bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang tersedia memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan industri sehingga mengurangi ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*). Kartu Pra-Kerja mempunyai peran sebagai salah satu komponen penting dalam perencanaan tenaga kerja makro dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang ada di Indonesia. Selain itu, program kartu Pra-Kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan salah satu langkah strategis untuk mengurangi angka pengangguran yang meningkat sebagai dampak dari pandemi Covid-19, yang pada akhirnya juga bertujuan menekan tingkat kemiskinan.



Gambar 1. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, 2019-2023

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia tahun 2019–2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Sebelum pandemi COVID-19, TPT berada di kisaran 5,28%. Namun, saat pandemi mulai menyebar luas pada tahun 2020 dan menyebabkan banyak bisnis mengurangi pekerja, angka pengangguran melonjak drastis hingga mencapai sekitar 7,07%. Hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja Indonesia mengalami guncangan yang signifikan. Untuk menangani situasi ini, pemerintah meluncurkan program kartu Pra-Kerja untuk membantu pencari kerja

dan korban PHK belajar lebih banyak melalui pelatihan. Angka TPT mulai menurun secara bertahap setelah program dimulai. Turun menjadi sekitar 6,49% pada tahun 2021, 5,86% pada 2022, dan akhirnya kembali ke angka sebelum pandemi sebesar 5,32% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa program Kartu Pra-Kerja berperan dalam menurunkan tingkat pengangguran dengan cara meningkatkan keterampilan masyarakat, sehingga mereka menjadi lebih siap dan kompetitif dalam menghadapi dinamika pasar kerja yang terus berkembang.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui program kartu Pra-Kerja, program ini merupakan program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Mulanya, program kartu Pra-Kerja ditujukan untuk pengembangan kompetensi kerja masyarakat, namun pada realitanya program ini diprioritaskan untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Akibat dari pandemi, alokasi anggaran program kartu Pra-Kerja menjadi dua kali lipat. Pada peluncuran awal program ini, terdapat beberapa masalah diantaranya banyak yang menentang keharusan penerima kartu Pra-Kerja untuk mengikuti pelatihan secara *online*. Mereka berpendapat bahwa lebih bermanfaat jika dananya diberikan langsung kepada penerima dibandingkan mengalir pada mitra pelatihan *online*.

Kartu Pra-Kerja ini bisa dibilang merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga pemerintah hanya memberikan kail beserta umpannya (Kartu Pra-Kerja) untuk mencari ikan (Pekerjaan) di danau yang sedikit ikannya (lapangan pekerjaan) dan bersaing dengan pemancing lainnya (angkatan kerja) (Consuello, 2020). Adanya program kartu Pra-Kerja ini adalah suatu langkah baik yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, program kartu Pra-Kerja menjadi salah satu hasil kebijakan yang dijadikan dasar untuk mengevaluasi berbagai permasalahan mendasar yang terjadi di tengah masyarakat. Urgensi yang mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan program kartu Pra-Kerja dikarenakan terdapat masalah ketenagakerjaan di Indonesia yaitu masih banyak tenaga kerja berpendidikan rendah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023, mayoritas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar. Sebanyak 36,82% dari total penduduk yang bekerja merupakan lulusan SD atau lebih rendah, sementara lulusan SMP mencapai 17,77%. Di sisi lain, hanya sekitar 10,32% tenaga kerja yang merupakan lulusan universitas, dan 2,44% lulusan diploma. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja Indonesia memiliki tingkat pendidikan rendah, yang berpotensi mempengaruhi produktivitas dan daya saing di pasar kerja. Apabila situasi ini tidak segera diatasi oleh pemerintah, maka mayoritas tenaga kerja di Indonesia berisiko didominasi oleh individu dengan tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan berakibat pada menurunnya kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya membuat mereka kurang mampu bersaing ditingkat global.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, posisi program kartu Pra-Kerja memiliki peran strategis dalam

perencanaan tenaga kerja makro. Program ini berfungsi sebagai sarana *upskilling* dan *reskilling* nasional, memberikan pelatihan keterampilan kepada pencari kerja, pekerja informal, dan orang-orang umum yang ingin mengubah pekerjaan mereka. Tujuannya adalah untuk mengurangi jarak antara keterampilan yang dipelajari dan kebutuhan industri yang sebenarnya. Kartu Pra-Kerja juga berfungsi sebagai alat intervensi pasar tenaga kerja dengan membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih adaptif dari perubahan pasar. Selain itu, melalui pelaksanaan program ini, pemerintah memperoleh data mikro yang sangat penting untuk perencanaan tenaga kerja masa depan, seperti profil peserta dan informasi tentang minat pelatihan. Melalui keterlibatan berbagai lembaga pelatihan serta platform digital, program ini mendorong terjalannya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta. Ini membuat pelatihan lebih variatif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Secara keseluruhan, melalui peningkatan keterampilan yang relevan, program kartu Pra-Kerja berkontribusi dalam menekan angka pengangguran struktural serta meningkatkan peluang kerja, baik di sektor formal maupun informal.

Implementasi Program Kartu Pra-Kerja di Indonesia

Program kartu Pra-Kerja merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam mencari pekerjaan, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan SDM yang unggul di Indonesia. Antusias dari masyarakat untuk program kartu Pra-Kerja ini juga sangat tinggi, karena pada tahun 2020 banyak masyarakat yang terdampak Covid-19 sehingga dengan adanya program ini masyarakat merasa lebih diuntungkan. Program Kartu Prakerja, sebagaimana dijelaskan di situs resmi prakerja.go.id, merupakan bantuan biaya pelatihan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia. Tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong produktivitas dan daya saing mereka. Program ini tidak hanya ditujukan bagi pencari kerja, tetapi juga terbuka untuk buruh, karyawan, dan pegawai. Secara umum, program ini bisa diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang menempuh pendidikan.

Tujuan dari program kartu Pra-Kerja ini yaitu untuk mengasah kemampuan masyarakat agar lebih siap di dunia kerja dan untuk meningkatkan peluang kerja yang lebih besar. Program kartu Pra-Kerja juga tidak hanya sebagai program bantuan yang hanya memberikan bantuan berupa uang kepada penerimanya, sekaligus program yang mendidik masyarakat agar tidak selalu mengharap uluran tangan dari pemerintah, dengan adanya program ini seharusnya bisa menjadikan masyarakat lebih mandiri dan menjadi batu loncatan agar memiliki kehidupan lebih baik lagi (Yana, 2021). Selain bertujuan untuk menurunkan pengangguran, pemerintah Indonesia juga berharap ekonomi Indonesia semakin tumbuh. Tujuan ini sudah terlihat sejak gelombang pertama kartu Pra-Kerja pada tahun 2020. Pada tahun 2022, tercatat ada 17% atau 387.234 kartu Pra-Kerja yang menjadi wirausaha. Angka ini berasal dari hasil survei Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra-Kerja terhadap 4,7 juta peserta. Persentase tersebut kemungkinan besar telah meningkat, karena pemilik kartu Pra-Kerja sudah mencapai 17,5 juta orang pada tahun 2023. Hingga

pada tahun 2024, terdapat lebih dari 18,9 juta orang yang menerima kartu Pra-Kerja tersebut.

Program Kartu Pra-Kerja merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang diluncurkan untuk meningkatkan kompetensi kerja masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan pengangguran. Sejak program ini diluncurkan telah mengalami perkembangan dari segi konsep, pelaksanaan, hingga optimalisasi pelatihan berbasis digital. Menurut Rahman dan Rahman (2021), Program Kartu Pra-Kerja terbukti cukup efektif dalam menanggulangi pengangguran di daerah. Program ini memberikan pelatihan keterampilan kerja yang aplikatif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan daya saing di pasar kerja. Mereka mencatat bahwa dengan akses pelatihan berbasis daring, peserta memiliki fleksibilitas dalam memilih jenis keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain sebagai bantuan sosial bersyarat, program ini juga diarahkan untuk menjadi jembatan bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan kerja yang memadai. Dalam masa pandemi COVID-19, Muhyiddin et al. (2022) menyebutkan bahwa Kartu Pra-Kerja bertransformasi menjadi kebijakan *welfare-to-work* yang penting.

Program ini juga tidak hanya membantu peserta dari sisi peningkatan kompetensi, tetapi juga menjadi alternatif bantuan sosial berbasis pelatihan kerja yang relevan dengan perubahan struktur ekonomi akibat pandemi. Wijayanti dan Humardhiana (2020) menekankan bahwa optimalisasi Kartu Pra-Kerja tidak hanya terletak pada pelatihan teknis semata, namun juga pada pelatihan *soft skills* seperti strategi *branding*. Hal ini penting bagi peserta yang ingin menjadi wirausahawan atau mengembangkan usaha mandiri setelah mengikuti pelatihan. Pemilihan jenis pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan lapangan dan industri juga merupakan kunci dari keberhasilan program ini dalam jangka panjang. Dengan demikian, Program Kartu Pra-Kerja telah berkembang dari sekadar program pelatihan kerja menjadi salah satu strategi kebijakan ketenagakerjaan nasional yang integratif, adaptif, dan inklusif. Perkembangan tersebut ditandai oleh pendekatan digitalisasi, diversifikasi pelatihan, dan sinergi antara bantuan sosial dan peningkatan kompetensi kerja.

Dalam implementasi Program Kartu Pra-Kerja, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam aspek administratif. Salah satu hambatan umum adalah ketidaksesuaian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang belum terbaru di sistem kependudukan nasional. Kondisi ini menyebabkan calon peserta tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Karena masalah ini berada di luar kewenangan Dinas Tenaga Kerja, masyarakat diarahkan untuk mengurus pembaruan data secara mandiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang kerap memperpanjang waktu penyelesaian. Selain itu, masyarakat juga dihadapkan pada permasalahan maraknya tautan palsu yang menyerupai laman resmi Kartu Pra-Kerja. Ketidakhatian dalam mengakses informasi membuat banyak orang tanpa sadar memberikan data pribadi pada situs palsu, yang kemudian berisiko disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Akibatnya, calon peserta yang telah menjadi korban sering

mengalami kesulitan ketika hendak mendaftar secara resmi. Di sisi lain, rendahnya literasi digital serta keterbatasan akses teknologi turut menjadi tantangan tersendiri, khususnya di daerah yang belum terjangkau internet. Karena seluruh proses dalam program ini dilakukan secara daring, mulai dari registrasi hingga pelatihan, peserta yang belum terbiasa menggunakan teknologi atau tidak memiliki fasilitas internet kerap mengalami hambatan dalam mengakses program secara optimal. Dengan demikian, meskipun Program Kartu Pra-Kerja bertujuan memberikan pelatihan yang merata, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan akses yang perlu diperbaiki (Ningrum et al., 2022).

Dampak Program Kartu Pra-Kerja Terhadap Peningkatan Ekonomi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh SMERU Research Institute (2023), sebanyak 89% peserta Program Kartu Pra-Kerja melaporkan adanya peningkatan keterampilan setelah mengikuti pelatihan. Selain itu, sekitar 53% di antaranya berhasil memperoleh pekerjaan baru atau memulai usaha mandiri dalam waktu enam bulan pasca-pelatihan. Program ini juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan peserta, dengan rata-rata kenaikan sebesar 27% dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan. Temuan ini mengindikasikan bahwa manfaat Program Kartu Pra-Kerja tidak terbatas pada peningkatan keterampilan jangka pendek, tetapi juga berperan dalam mendorong kemajuan ekonomi individu secara lebih luas.

Sementara itu, laporan dari Bank Dunia (2023) mengungkapkan bahwa Program Kartu Pra-Kerja merupakan salah satu program pelatihan digital terbesar di dunia dari segi jumlah peserta. Capaian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelatihan telah berhasil memperluas akses masyarakat terhadap pengembangan keterampilan, terutama bagi kelompok rentan yang sebelumnya mengalami hambatan dalam mengakses pelatihan konvensional. Kelompok seperti pekerja sektor informal, perempuan, dan masyarakat di luar Pulau Jawa menjadi penerima manfaat utama dari sistem pelatihan berbasis teknologi ini.

Secara keseluruhan, keberhasilan Program Kartu Pra-Kerja menunjukkan peran strategisnya dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui pendekatan digital, program ini mampu menjangkau peserta dalam skala besar dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini membuka peluang untuk mereformasi sistem pelatihan nasional menuju arah yang lebih inklusif, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pasar kerja masa kini dan mendatang.

Kelebihan dan Kekurangan Program Kartu Pra-Kerja

Program Kartu Pra-Kerja memiliki sejumlah keunggulan penting dalam mendukung pengembangan kapasitas tenaga kerja di Indonesia. Salah satu kekuatan utamanya adalah keberhasilan dalam meningkatkan keterampilan serta pendapatan peserta. Hingga awal tahun 2025, tercatat lebih dari 18,6 juta orang telah mengikuti pelatihan melalui program ini, dengan peningkatan pendapatan peserta rata-rata sebesar 15–17% per bulan (Svara Institute). Selain itu, program ini turut berperan

dalam membuka akses terhadap peluang kerja dan kewirausahaan. Survei DEFINIT yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) menunjukkan bahwa 95% peserta merasakan peningkatan akses terhadap pekerjaan atau usaha setelah menyelesaikan pelatihan. Jangkauan pelatihan yang merata di seluruh kabupaten/kota di 38 provinsi, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan, memperkuat peran program ini dalam mendorong inklusi sosial melalui pendekatan digital.

Keunggulan lainnya terletak pada fleksibilitas model pelatihan yang ditawarkan. Terdapat tiga format pelatihan yang tersedia, yaitu tatap muka (*luring*), *webinar* (daring), dan pelatihan mandiri (*asynchronous*), yang memberikan keleluasaan bagi peserta untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi pribadi masing-masing. Fitur ini sangat membantu peserta yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur atau yang memiliki jadwal yang tidak fleksibel. Pendekatan pelatihan yang adaptif ini menjadikan program Kartu Pra-Kerja tidak hanya efisien dari sisi pelaksanaan, tetapi juga lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan peserta. Selain itu, kombinasi antara bantuan biaya pelatihan dan insentif tunai terbukti mampu meningkatkan semangat belajar sekaligus memberikan dukungan finansial selama masa pencarian kerja atau pengembangan usaha.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi program yang perlu diperhatikan. Salah satu persoalan utama adalah ketimpangan akses teknologi, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), yang menghadapi kendala jaringan internet dan keterbatasan perangkat digital. Hal ini menyebabkan kesenjangan partisipasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di samping itu, kualitas pelatihan yang disediakan oleh berbagai mitra penyelenggara masih belum seragam. Sebagian pelatihan dinilai terlalu umum atau tidak selaras dengan kebutuhan riil dunia kerja. Kelemahan lainnya adalah minimnya sistem evaluasi jangka panjang yang komprehensif, sehingga efektivitas program dalam meningkatkan karir dan kesejahteraan peserta secara berkelanjutan belum dapat dipetakan secara menyeluruh. Untuk itu, dibutuhkan penguatan sistem *monitoring* berbasis data jangka panjang guna mendukung perbaikan berkelanjutan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Kartu Pra-Kerja telah memainkan peran penting dalam strategi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya dalam konteks perencanaan tenaga kerja makro. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kompetensi kerja masyarakat melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar, baik dalam aspek keterampilan teknis maupun non-teknis. Selain itu, program ini juga berhasil mendukung pengurangan pengangguran, meningkatkan pendapatan peserta, serta memperluas akses pelatihan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani. Kartu Pra-Kerja juga berfungsi sebagai penghubung antara sistem pendidikan dan dunia kerja, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pelatihan nasional. Secara keseluruhan,

program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas angkatan kerja Indonesia.

Meskipun program ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, beberapa tantangan masih perlu diatasi. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur digital, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), guna menjamin akses yang setara terhadap pelatihan. Diperlukan pula upaya peningkatan kualitas dan pengawasan terhadap lembaga penyedia pelatihan agar tercipta standar mutu yang konsisten. Selain itu, pengembangan sistem *monitoring* dan evaluasi jangka panjang yang berbasis data sangat penting untuk menilai efektivitas program secara berkelanjutan. Ke depan, Kartu Pra-Kerja sebaiknya tidak hanya difokuskan sebagai respons terhadap krisis, melainkan diarahkan menjadi bagian dari strategi pembangunan SDM jangka panjang yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Fokus pelatihan juga perlu ditingkatkan pada pengembangan *soft skills* dan literasi digital guna menyiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., Ghofur, R. A., & Hilal, S. (2023). Efektivitas Program Kartu Prakerja dalam Membangun Sumber Daya Manusia Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(3), 890–893.
- Badan Pusat Statistik (2019). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2019 <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html>
- Badan Pusat Statistik (2020). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2020* <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/-revisi-per-18-02-2021%E2%80%93agustus-2020%E2%80%93tingkat-pengangguran-terbuka%E2%80%93tpt%E2%80%93sebesar-7-07-persen.html>
- Badan Pusat Statistik (2021). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2021* <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/11/05/1816/-revisi-per-09-11-2021--agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>
- Badan Pusat Statistik (2022). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2022* <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html>
- Badan Pusat Statistik (2023) Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/08/1b09be03a0951907a562f755/keadaan-pekerja-di-indonesia-agustus-2023.html>
- Badan Pusat Statistik (2023). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2023
- Consuello, Y. (2020). Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19. *Adalah*, 4(1), 93-100

- Firnanda, A., Fitri, C., & Ardianto, F. (2021). Program Kartu Prakerja ditinjau dari aspek kemanfaatan dan aksesibilitas. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), 170-180.
- Fitriani. (2022). "Evaluasi Program Kartu Prakerja dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 109-121.
- Ginting, M. L. B., & Herdiyana, R. (2020). Peran pemerintah pada kebijakan kartu prakerja dalam memulihkan kesejahteraan pekerja di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Analis Kebijakan*, 4(2), 1-15.
- Koestedjo, E. H. (2016). *PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BONDOWOSO*. 15(2), 1-23.
- Muhyiddin, M., Putra, F., Suryono, I. L., Yanwar, Y., Warsida, R. Y., & Yani, R. A. A. (2022). Program Kartu Prakerja: Konsepsi dan implementasi kebijakan welfare-to-work di masa pandemi Covid-19. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 1-17.
- Ningrum, H. S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(4), 160-171.
- Nurhadi, W. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja di Tengah Pandemi COVID-19*.
https://www.researchgate.net/publication/343360571_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PROGRAM_KARTU_PRAKERJA_DI_TENGAH_PANDEMI_COVID-19
- Ondang, G. L., Mingkid, E., & Tasik, F. C. M. (2022). Efektivitas program kartu prakerja bagi fresh graduate di Kota Manado. *Agri-Sosioekonomi: Jurnal Ilmiah Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), 345-354.
- Rahman, D., & Rahman, K. (2021). Efektivitas kebijakan pemerintah tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja: Studi program Kartu Prakerja dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(1), 39-53.
- Septiyadi, M. R., & Rahayu, E. (2022). Program Kartu Prakerja Sebagai Program Pemberdayaan Di Bidang Ketenagakerjaan Di Tengah Pandemi. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(2), 5.
- Shabia, G. N. A., Dhanwani, N. D., & Pratiwi, R. I. (2022). KESEJAHTERAAN YANG RETAK: MENKRITISI UPAYA PEMULIHAN PASCA PANDEMI DARI POSISI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KESEJAHTERAAN. *Masyarakat Indonesia*, 48(2), 161-176.
- Wijayanti, R. I., & Humardhiana, A. (2020). Optimalisasi program Kartu Prakerja dengan pelatihan branding strategy. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 109-122.